

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan :

1. Penatausahaan dalam hal pengelolaan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah berjalan sesuai dengan permendagri No 19 Tahun 2016.
2. Pembukuan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
3. Inventarisasi aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
4. pelaporan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terlaksana dengan optimal dan efektif sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan agar setiap pegawai khususnya pada bidang aset Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk

meningkatkan kepedulian untuk pengurusan barang milik daerah atas tanah yang berada pada SKPD yang bersangkutan, hal ini berguna agar pegawai saling berkerja sama dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi untuk sama-sama menjaga serta merawat tanah milik daerah agar tetap terjaga.

2. Kepada penelitian terdahulu karena penelitian ini sangat kualitatif bisa dipikirkan variable-variabel lain yang memungkinkan atau berpengaruh terhadap pengelolaan untuk diuji secara statistik atau berarah pada penelitian kuantitatif

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin MHD Habibi. 2010. *"Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)"*.
- As'ad, Moh. 2001. *"Ensiklopedia Manajemen"*. Edisi Kedua, Cet I, Bina Aksara, Jakarta. Rajawali Press. Jakarta.
- Erizul dan Yulianti. 2014. *"Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah"*. Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol.2 No.2.
- Hasti. 2013. *"Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan"*. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Hasfi. 2013 *"pengelolaan barang milik Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang"*
- Koling, Ilat dan Pinatik. 2015. *"Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon"*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang *"Pelaksanaan Pengadaan"*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang *"Pedoman Pengelolaan Barang Daerah"*.
- Mardiasmo, 2004. *"Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah"*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET
- Priyono. 2013. *"Keandalan Informasi Laporan Keuangan Daerah (Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang)"*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang *"Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah"*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang *"Pendaftaran Tanah"*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang *"Pengelolaan Aset"*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang *"Kawasan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom"*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2010 Tentang *"Pengelolaan Barang Daerah"*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Tentang *"Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah"*. Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Tahun 2007.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang “*Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*”.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang “*Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*”.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit. PPM.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang “*Pemerintah Daerah*”.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang “*Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*”.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang “*Perbendaharaan Negara*”.
- Wulandari. 2019. Pengaruh Ekstra Tanaman Sebagai Sumber ZPT Alami Terhadap Pertumbuhan Setek Tanaman Lada (*Piper nigrum L.*). Jurnal Argotek.
- Yusuf, M. 2011. “*Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*” Cetakan Kedua. Salemba Empat, Jakarta.